

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
GUGATAN REKONVENSI ATAS HAK ISTRI DAN ANAK DALAM
PERKARA CERAI TALAK**

(Studi Putusan Nomor : 1828/Pdt.G/2023/PA.Pwt)

Oleh :

Muhammad Adam Fadhil

E1A021028

ABSTRAK

Perkara Nomor 1828/Pdt.G/2023/PA.Pwt merupakan salah satu perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon, istri sebagai Termohon, dalam jawaban menggugat balik/rekonvensi atas hak-hak istri dan anak, oleh majelis hakim gugatan rekonvensinya dikabulkan sebagian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Atas Hak Istri dan Anak serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan dan konsep Data sekunder dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif serta disajikan dalam teks naratif. Hasil penelitiannya pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam mengabulkan gugatan rekonvensi terbukti, didasarkan dengan hasil pembuktian yang diajukan oleh dalil termohon dalam rekonvensi terbukti tetapi dikabulkan hanya sebagian yaitu dengan memperhatikan faktor lamanya usia pernikahan dan kemampuan ekonomi pemohon. Akibat Hukumnya pemohon sebelum ikrar talak wajib membayar nafkah Iddah Rp 4.500.000 (*empat juta lima ratus rupiah*), *Mut'ah* Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*), Nafkah Madhiyah selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*).

Kata Kunci : Cerai Talak, Gugatan Rekonvensi yang dikabulkan.

ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION IN GRANTING A COUNTERCLAIM FOR THE RIGHTS OF WIFE AND CHILDREN IN A DIVORCE CASE

(Study of Decision Number : 1828/Pdt.G/2023/PA.Pwt)

**By :
Muhammad Adam Fadhil**

E1A021028

ABSTRACT

Case Number 1828/Pdt.G/2023/PA.Pwt is a divorce case filed by the husband as the Petitioner and the wife as the Respondent, in which the wife filed a counterclaim/reconvention regarding the rights of the wife and children. The panel of judges granted the counterclaim in part. The purpose of this study is to identify and analyze the judges' considerations in granting the counterclaim regarding the rights of the wife and children, as well as to identify and analyze the legal consequences thereof. This research uses a normative legal method with a case approach, legislation, and secondary data analyzed prescriptively through literature review and analyzed normatively qualitatively, presented in narrative text. The results of the study show that the considerations of the panel of judges at the Purwokerto Religious Court in granting the counterclaim were based on the evidence presented by the respondent in the counterclaim, which was proven but only partially granted, taking into account the length of the marriage and the economic capacity of the petitioner. The legal consequences are that the petitioner must pay maintenance during the waiting period (Iddah) of Rp. 4,500,000 (four million five hundred thousand rupiah), mut'ah of Rp. 5,000,000 (five million rupiah), and madiyah maintenance for 5 (five) months amounting to Rp. 5,000,000 (five million rupiah).

Keywords : Divorce and counterclaim granted.